

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Profil Provinsi Gorontalo

1. Kondisi Umum

a. Geografis

Wilayah Gorontalo terletak di antara $0^{\circ}19'$ – $1^{\circ}15'$ Lintang Utara dan $121^{\circ}23'$ - $125^{\circ}14'$ Bujur Timur. Dari posisi tersebut wilayah ini berbatasan langsung dengan dua Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Luas provinsi gorontalo secara keseluruhan adalah 12.435 km^2 . Apabila di dibandingkan dengan wilayah indonesia, lua wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen.

Provinsi gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Dan Kota Gorontalo. Kabupaten Pohuwato yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah terluas di provinsi Gorontalo, sedangkan kota Gorontalo yang merupakan ibukota provinsi memiliki wilayah paling kecil (BPS Provinsi Gorontalo, 2018).

Tabel 2.1**Luas Wilayah Provinsi Gorontalo**

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1.	Boalemo	1.736,61	13,97
2.	Gorontalo	2.143,48	17,24
3.	Pohuwato	4.455,60	35,83
4.	Bone Bolango	1.891,46	15,21
5.	Gorontalo Utara	2.141,86	17,22
6	Kota Gorontalo	65,96	0,53
Provinsi Gorontalo		12.435,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, Tahun 2015

Data di atas menunjukkan luas dari setiap wilayah yang berada di Provinsi Gorontalo. Total luas wilayah Provinsi Gorontalo yakni seluas 12.435,00 km². Kabupaten Pohuwato, yang merupakan wilayah paling barat dari provinsi Gorontalo menjadi wilayah terluas dengan luas wilayah sebesar 4.455,60 km². Adapun daerah yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Kota Gorontalo dengan luas wilayah sebesar 65,96 km² atau hanya 0,53 % dari keseluruhan persentase wilayah provinsi Gorontalo.

Secara umum jika dilihat komposisi permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya, provinsi ini mempunyai banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda. Gunung tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang

tertinggi di provinsi gorontalo. Sedangkan gunung yang terendah adalah gunung litu-litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo. Disamping memiliki banyak gunung, provinsi gorontalo ini juga dilintasi banyak sungai. Sungai terpanjang adalah sungai paguyaman yang terletak di kabupaten boalemo dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai terpendek adalah sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara.

b. Iklim

Kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara yang cukup panas. Suhu minimum terjadi di bulan Agustus yaitu 23,3 °C. Sedangkan suhu udara rata-rata Provinsi Gorontalo berkisar antara 26,6 – 28,0 °C.

Provinsi Gorontalo memiliki kelembaban udara yang relatif tinggi, rata-rata kelembaban udara tertinggi pada tahun 2017 terjadi pada bulan Januari dengan kelembaban mencapai 85,0 persen. Sedangkan untuk curah hujan tertinggi terdapat di bulan Juni yaitu 253 mm dan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari dan Mei sebanyak 22 hari. Rata-rata kecepatan angin pada tahun 2017 yang tercatat oleh stasiun Metereologi umumnya merata untuk setiap bulannya yaitu berkisar antara 2-3 knot.

2. Data Demografi

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi

Gorontalo 2012-2018

Wilayah se Provinsi	Jumlah Penduduk (Jiwa)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Boalemo	137.476	141.547	145.580	149.832	154.008	158.333	159.105
Gorontalo	363.146	365.781	368.149	370.441	372.856	374.923	373.858
Pohuwato	136.324	139.675	143.338	146.896	150.385	153.991	154.714
Bone Bolango	146.773	148.971	151.094	153.166	155.238	157.186	155.950
Gorontalo Utara	107.092	108.324	109.502	110.700	111.824	112.975	111.693
Kota Gorontalo	189.476	193.692	197.970	202.202	206.454	210.782	210.822
Provinsi Gorontalo	1.080.287	1.097.990	1.115.633	1.133.237	1.150.765	1.168.190	1.166.142

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, Tahun 2018

Data diatas menunjukkan jumlah penduduk provinsi Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Data tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan penduduk di provinsi gorontalo pada setiap tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah penduduk di provinsi Gorontalo sebanyak 1.080.287 jiwa. Adapun pada tahun 2018 jumlah penduduk di provinsi Gorontalo yakni sebanyak 1.166.142 jiwa. Dalam kurun waktu 2012-2018 Kabupaten Gorontalo menjadi daerah dengan jumlah penduduk yang paling banyak, sehingga tidak heran pada setiap kontestasi politik kabupaten gorontalo sering menjadi lumbung suara bagi setiap partai. Begitu pula halnya dengan daerah pemilihan, dapil untuk kabupaten

gorontalo yang dibagi menjadi 2 daerah pemilihan yakni dapil gorontalo 3 dan dapil gorontalo 4. Sedangkan daerah yang paling sedikit jumlah penduduknya yakni Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2018

Kelompok Umur	2018		
	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
0-4	49.480	48.389	97.869
05-09	50.091	48.989	99.080
10-14	49.807	48.954	98.761
15-19	49.188	49.441	98.629
20-24	49.591	49.329	98.920
25-29	49.657	48.714	98.371
30-34	49.276	47.807	97.083
35-39	46.767	45.831	92.598
40-44	42.956	42.313	85.269
45-49	39.521	37.907	77.428
50-54	32.908	32.805	65.713
55-59	26.295	26.985	53.280
60-64	20.116	20.603	40.719
65-69	13.654	15.021	28.675
70-75	8.141	9.927	18.068
75+	6.371	9.308	15.679
Jumlah	583.819	582.323	1.166.142

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan data jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo berdasarkan kelompok umur dan juga jenis kelamin pada tahun

2018. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kelompok umur 5-9 tahun menjadi kelompok umur dengan jumlah penduduk terbanyak yakni sebanyak 99.080 jiwa, kemudian kelompok umur 20-24 tahun menjadi penyumbang jumlah penduduk terbanyak kedua yakni sebanyak 98.920 jiwa. Dan disusul dengan kelompok umur 10-14 tahun dengan 98.761 jiwa dan 15-19 tahun 98.629 jiwa penduduk. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong dalam kelompok umur yang masuk dalam milenial serta pemilih pemula dalam pemilu bisa dikatakan sangat banyak di provinsi Gorontalo. Oleh karenanya pada kontestasi politik seperti pemilu legislatif, dibutuhkan strategi yang tepat untuk meraih dukungan dari para kaum milenial. Mengingat besarnya potensi suara yang bisa didapat dari kaum milenial di provinsi Gorontalo.

3. Kondisi Politik

Konstelasi politik lokal di provinsi Gorontalo tidak dapat dikesampingkan dari hegemoni dan kekuatan partai-partai politik yang telah mendarah daging di Provinsi Gorontalo menjadi salah faktornya. Sebut saja Partai Golkar, PDIP, HANURA, PPP. Sangat kuatnya kekuatan politik partai seperti halnya Partai Golkar yang selalu menjadi pemenang pada pemilu legislatif di tingkat provinsi Gorontalo, dan hampir di seluruh kabupaten kota di provinsi gorontalo. Ditambah lagi dengan kader partai yang menjabat sebagai kepala daerah membuat kekuatan politik partai tersebut sangat kuat terutama untuk mendulang dukungan suara dari masyarakat. Kekuatan politik partai lain semisal PPP yang memiliki kader

sebagai Bupati Gorontalo, PDIP yang memiliki kader bupati boalemo juga masih sangat kuat.

Tabel 2.4

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo 2014-2019 menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin

Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Partai Golkar	8	4	12
PAN	4	2	6
PPP	4	0	4
Partai Hanura	3	2	5
Partai Demokrat	4	0	4
PDIP	3	3	6
PKS	5	0	5
PKB	0	1	1
Partai Gerindra	0	1	1
Jumlah	31	13	44

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo

Tabel diatas menunjukkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo periode 2014-2019 sebanyak 44 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 31 laki-laki dan 13 perempuan. Dari hasil pemilu 2014 hanya terdapat 9 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi. 9 partai tersebut yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Partai Golkar sebagai partai yang sangat kuat di Gorontalo masih menjadi peraih kursi terbanyak di Dewan Provinsi dengan 12 Kursi, disusul PAN dan PDIP dengan 6 Kursi. Adapun partai dengan peroleh kursi paling sedikit yakni Partai Gerindra dan PKB dengan perolehan masing-masing 1 kursi. Partai Golkar juga menjadi menyumbang terbanyak anggota dewan berjenis kelamin Laki-laki dengan 8 orang dan perempuan dengan 4 orang. Ini menunjukkan bahwa kekuatan politik partai besar dan telah mendarah daging di Gorontalo layaknya Golkar, PAN, PDIP masih sangat kuat dalam peta perpolitikan di Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.5
Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Per DAPIL Tahun 2014

No	Partai Politik	Perolehan Kursi						Jumlah Kursi
		Dapil 1	Dapil 2	Dapil 3	Dapil 4	Dapil 5	Dapil 6	
1	NASDEM	-	-	-	-	-	-	-
2	PKB	-	-	-	-	-	1	1
3	PKS	1	1	1	1	-	1	5
4	PDIP	1	1	1	1	1	1	6
5	GOLKAR	2	1	2	2	1	4	12
6	GERINDRA	-	-	-	-	-	1	1
7	DEMOKRAT	1	-	1	1	-	1	4
8	PAN	1	1	2	1	1	1	7
9	PPP	1	1	1	-	1	-	4
10	HANURA	1	1	1	-	1	1	5
14	PBB	-	-	-	-	-	-	-
15	PKPI	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	8	6	9	6	5	11	45

Sumber: <https://gorontalo.kpu.go.id/>, Tahun 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa Partai politik besar seperti Partai Golkar, PDIP, dan PAN berhasil memperoleh perolehan kursi di setiap dapil

yakni tersebar mulai dari dapil Gorontalo 1 (Kota Gorontalo), dapil Gorontalo 2 (Bone Bolango), dapil Gorontalo 3 (Kabupaten Gorontalo A : Limboto cs), dapil Gorontalo 4 (Kabupaten Gorontalo B : Tibawa cs,) dapil Gorontalo 5 (Gorontalo Utara) serta dapil Gorontalo 6 (Boalemo-Pohuwato). Ini menunjukkan bahwa kekuatan politik partai tersebut beserta basis dukungan suaranya tersebar merata hampir di setiap kabupaten Kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Berbeda halnya dengan partai lain semisal PKB dan Gerindra yang hanya memiliki basis dukungan suara di salah satu dapil saja.

2.2 Profil Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

1. Latar Belakang Pendirian Partai

Era reformasi telah berusia kurang lebih 20 tahun atau bisa dikatakan telah berusia separuh baya dari lamanya rejim orde baru berkuasa. Tentu tidak dapat dinafikan banyak kemajuan diberbagai sektor yang telah dicapai. Salah satunya dibidang politik dan sosial. Rakyat dapat merayakan mewahnya kebebasan berserikat, berkumpul dan kebebasan pers yang pada masa orde baru sangat sulit untuk dapat dilaksanakan. Terpilihnya pemimpin dari kalangan rakyat biasa adalah indikasi bahwa demokrasi telah berbuah di Indonesia. Seorang pemimpin yang lahir dari rahim reformasi. Pemimpin baru yang tak terkait dengan rejim masa lalu. Sejarah akan mencatat, inilah kali pertama Indonesia dipimpin oleh seseorang dari kalangan rakyat biasa, bukan berdarah biru ataupun tentara. Namun dinamika politik nasional terlihat sangat dinamis. Apakah 'presiden orang biasa' ini akan efektif (DPP PSI, 2015).

Namun jelas disadari bahwa masih banyak amanah reformasi yang belum terwujud. Janji kesejahteraan masih jauh panggang dari api. Angka kesenjangan antara si kaya dan si miskin kian menganga. Korupsi masih menjadi musuh utama pembangunan (bahkan seorang tersangka korupsi dinyatakan 'fit' dan 'proper' menduduki kursi kapolri oleh DPR RI). Perilaku intoleransi di berbagai daerah masih menghantui beberapa kelompok minoritas di tanah air.

Salah satu akar dari deretan masalah di atas adalah partai politik. Demokrasi meletakkan peran sentral partai politik sebagai wadah yang menyalurkan dan mengagregasi aspirasi, tuntutan dan harapan rakyat. Melalui para kadernya di legislatif dan eksekutif, kebijakan menyangkut hidup orang banyak diputuskan. Politik yang mengatur kebijakan untuk bersama, sejatinya adalah tugas moral-suci partai politik. Namun kebijakan partai politik yang harusnya bermuara pada kepentingan publik, diputar-arah menjadi membela kepentingan segelintir elit. Rahim partai politik masih pelit melahirkan pemimpin (gubernur/bupati/walikota) pro rakyat yang jumlahnya masih dapat dihitungkan dengan jari. Partai-partai politik yang ada sekarang telah terjebak kepada kepentingan rantai ekonomi-politik antar-elit partai yang lain saling berkelindan.

Dalam konteks ini persepsi negatif dan apatisisme politik di tengah masyarakat wajar saja berkembang. Namun, seperti yang dikatakan Arief Budiman, seorang intelektual-aktivis “(Tapi) sistem kepartaian merupakan inti dari sistem politik yang demokratis. Memusuhi partai sebagai sisten sama saja dengan menghancurkan demokrasi. Yang harus kita musuhi adalah orang-orang yang sekarang ada di partai politik.” Kehadiran partai baru bisa dijadikan solusi alternatif. Sebuah partai yang dapat memutus rantai tali-temali kepentingan ekonomi-politik elit yang tak segan mengorbankan kepentingan rakyat. Tentu saja partai baru yang benar-benar baru. Partai baru yang menawarkan kebaruan dari segala perspektif dan aksi politik. Bukan partai baru yang mengaku baru tapi sejatinya hasil 'daur-

ulang' spirit partai-partai lama. Oleh karenanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hadir di kancah perpolitikan Indonesia.

PSI berkeyakinan, partai baru adalah sebuah kebutuhan, karena PSI percaya bahwa sirkulasi kekuasaan tanpa diisi oleh sirkulasi generasi hanya akan menjadi ajang reproduksi masa lalu, tanpa ada sesuatu yang benar-benar baru. Lebih jauh, PSI didirikan, untuk menggalang gerakan politik yang dilandasi oleh rasa solidaritas untuk kemanusiaan. Karena PSI meyakini, sebagaimana Gusdur meyakini, bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Politik harus ditopang oleh kemanusiaan, begitu juga kemanusiaan harus ditopang oleh solidaritas sesama anak bangsa. Di atas pendirian politik seperti itu, PSI mulai membangun dan mempersiapkan diri sebagai partai masa depan.

2. Visi dan Misi

Visi

Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat (pasal 4 AD ART PSI).

Misi

- 1) Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir dan terstruktur.
- 2) Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.
- 3) Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme,

mendirikan kembali benteng- benteng kebhinnekaan dan membangun kembali pondasi gotong royong.

- 4) Mendorong mar tabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melihat kondisi geopolitik internasional yang sedang berkembang (pasal 5 AD ART PSI).

3. Tujuan dan Fungsi Partai

Tujuan

Partai Solidaritas Indonesia bertujuan mewujudkan Indonesia berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat (pasal 7 AD ART PSI).

Fungsi

- 1) Menggalang solidaritas nasional semesta yang terdiri dari seluruh komponen bangsa;
- 2) Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi;
- 4) Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab;
- 5) Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip Demokrasi Ekonomi;
- 6) Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum;
- 7) Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia;

- 8) Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial-budaya yang egaliter berdasarkan prinsip (pasal 8 AD ART PSI).

4. Prinsip Politik

1. Partai moderen: terbuka, demokratis, dipimpin, berbasis platform, budaya partisipasi, berkemajuan

Terbuka: PSI terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat perundang- undangan Partai Politik. Terbuka untuk seluruh latar belakang etnis, agama, suku, ras, keyakinan, gender dan latar belakang sosial lainnya. Berpandangan terbuka, tidak sektarian dan eksklusif.

Demokratis: PSI dalam menjalankan organisasinya menghormati prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan musyawarah mufakat, keteraturan organisasi, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, menolak diskriminasi (agama, gender, suku, etnis dll.).

Terpimpin: Dalam struktur organisasinya, PSI menganut sitem organisasi yang dipimpin dengan kepemimpinan politik tertinggi dibawah Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat. Sementara kepemimpinan eksekutif administratif partai sepenuhnya dibawah Dewan Pimpinan Pusat. Pemisahan kepemimpinan politik dan kepemimpinan administratif diyakini sebagai langkah baru untuk melakukan perbaikan dalam sistem partai politik di Indonesia.

Berbasis Platform: Salah satu strategi yang paling efektif untuk menciptakan kondisi partai beranggotakan massa yang sebenarnya adalah proses pengembangan program dasar bersama secara demokratis.

Budaya Partisipasi: Untuk dapat bekerja dan mengamankan legitimasi partai demokratis, maka PSI harus secara seksama membentuk demokrasi internal partai yang berorientasi pada partisipasi. Langkah-langkah pembangunan budaya dilakukan secara efektif dan dapat dipercaya serta tidak mengesampingkan efektifitas organisasi.

Berkemajuan: Partai yang moderen adalah partai yang bisa menjawab perkembangan jaman. Gerakannya selalu dinamis dan bergerak maju sesuai kebutuhan rakyat dan negara. Prinsip-prinsip politiknya adalah prinsip yang kontemporer, tidak tersandera dalam kungkungan ideologi yang puritan. Ideologi yang baik adalah ideologi yang bisa menjawab persoalan kekinian. Bukan ideologi yang anti kritik dan tidak bisa dirubah layaknya kitab suci. Hanya dengan membangun PSI yang berkemajuan, maka PSI akan selalu relevan sebagai partai yang solutif bagi kebutuhan rakyat banyak (DPP PSI, 2015).

2. Kemajemukan/pluralisme

Legitimasi PSI sebagai partai yang menjunjung tinggi kemajemukan tidak hanya sebatas kata-kata tapi menjadi nafas dan prinsip PSI dalam organisasi maupun gerakannya. Ini menjadi prinsip dasar yang wajib dipahami oleh seluruh kader di setiap tingkatan.

Indonesia adalah bentuk kemajemukan itu sendiri, Indonesia adalah mozaik yang dibentuk dari warna- warna suku, agama dan budaya. PSI menyadari bahwa Bhineka Tunggal Ika adalah sebuah prinsip yang senantiasa menjadi nafas politik dalam setiap program dan gerakannya. Perbedaan adalah takdir Ilahiah yang tidak bisa dirubah, kemajemukan adalah takdir historis Indonesia. Untuk itu PSI sebagai partai baru senantiasa mewajibkan kader-kadernya untuk memberikan penghormatan yang tinggi pada kemajemukan tersebut dan menerimanya sebagai sebuah takdir Ilahiah dan takdir historis

3. Demokrasi substantif

Demokrasi substantif juga menolak jika politik hanya dilihat sebagai sirkulasi kekuasaan periodik (lima tahunan jika di Indonesia), tanpa adanya pembangunan dan kemajuan di aras lima hak warga negara tersebut. PSI memiliki keyakinan, bahwa politik sejatinya adalah untuk membuat kehidupan warga negara menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, bukan hanya pergantian elit, tapi perubahan nasib secara keseluruhan. Bukan hanya perubahan dalam hal penghasilan ekonomi, tapi juga peningkatan standar kebahagiaan dan kelayakan hidup. Termasuk perasaan aman dalam terminologi human security atau keamanan insani: bebas dari perasaan takut dan terpenuhi kebutuhan hidup dasarnya.

4. Demokrasi Ekonomi

PSI berpendirian mengusung secara konsisten prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana termaktub dalam rumusan lengkap Pasal 33 UUD 1945: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, (5) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, (6) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, (7) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (DPP PSI, 2015).

5. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender bagi PSI berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan

keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Keadilan gender bagi PSI adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

6. Negara Kesejahteraan

Mandat negara Republik Indonesia adalah negara kesejahteraan, hal ini jelas termaktub dalam UUD 1945. PSI memberi makna Negara Kesejahteraan sebagai model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

7. Hak Asasi Manusia

Kader PSI di seluruh tingkatan wajib untuk menunjukkan penghormatan terhadap Hak asasi setiap manusia, karena hak ini adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak dirinya lahir dan tidak dapat dikurangi apalagi dihilangkan oleh siapapun dalam kondisi apapun selama manusia tersebut hidup. Sebagai contoh: tidak seorangpun dari kita yang bisa memilih untuk terlahir sebagai orang Jawa, Bugis, Padang, Cina atau apapun. Semua itu adalah identitas yang melekat

sejak kita lahir, dia adalah identitas yang terlahir karena kehendak yang kuasa, karenanya setiap orang tidak bisa mendapat ketidakadilan hanya karena identitas yang sudah melekat pada dirinya tersebut.

8. Penghormatan Ekologis

PSI berpendirian bahwa manusia dan alam adalah sebuah kosmos yang tidak terpisahkan, tindakan manusia akan berpengaruh terhadap lingkungan hidup, demikian juga proses alamiah yang terjadi pada lingkungan hidup akan berakibat langsung pada daya hidup manusia.

9. Keadilan Sosial

PSI sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sudah tentu, lahirnya gagasan tentang definisi keadilan sosial ini merupakan hasil refleksi Soekarno tentang masa gelap sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengalami penderitaan, penindasan, penghinaan dan penghisapan oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Pernyataan teks di atas membuktikan bahwa Soekarno ingin mencanangkan keadilan sosial sebagai warisan dan etika bangsa Indonesia yang harus diraih. Upaya agar keadilan sosial dapat terwujud, maka keadilan sosial itu harus dimulai dari hidup bermasyarakat.

5. Struktur Partai dan Daftar Nama Caleg

Struktur Partai terdiri dari (pasal 14 AD ART PSI) :

- 1) Dewan pembina sebagai pemegang otoritas tertinggi Partai;
- 2) Dewan Pertimbangan Nasional;
- 3) Dewan Pakar Nasional;
- 4) Mahkamah Partai;
- 5) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai eksekutif Partai di tingkat nasional dan berkedudukan di ibukota Negara;
- 6) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sebagai eksekutif Partai di tingkat Provinsi dan berkedudukan di ibukota Provinsi;
- 7) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebagai eksekutif Partai di tingkat kabupaten/kota dan berkedudukan di ibukota kabupaten/kota;
- 8) Dewan Pimpinan cabang (DPC) sebagai eksekutif Partai di tingkat kecamatan dan berkedudukan di ibukota kecamatan;
- 9) Dewan Pimpinan Ranting (DPR) sebagai eksekutif Partai di tingkat kelurahan/desa dan berkedudukan di ibukota kelurahan/desa;
- 10) Perwakilan Luar Negeri Partai;
- 11) Organisasi Sayap Partai.

a. Struktur Kepemimpinan PSI

Struktur kepemimpinan PSI dibangun seramping mungkin untuk efektivitas dan efisiensi kerja-kerja politik menyiapkan verifikasi Kumhan dan KPU. Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Indonesia (DPP PSI) terdiri dari 9 (Sembilan) orang. Ketua Umum DPP PSI adalah Grace Natalie Louisa. Sekretaris Jenderal DPP PSI adalah Raja Juli Antoni.

Dewan Pimpinan Wilayah Solidaritas Indonesia (DPW PSI) adalah kepemimpinan PSI pada level propinsi yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara.

Dewan Pimpinan Daerah Solidaritas Indonesia (DPd PSI) adalah kepemimpinan PSI pada level kota/kabupaten yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara.

Dewan Pimpinan Cabang Solidaritas Indonesia (DPC PSI) adalah kepemimpinan PSI pada level kecamatan yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

b. Struktur Pengurus DPW PSI Provinsi Gorontalo

Tabel 2.6

Struktur Pengurus DPW PSI Provinsi Gorontalo

Jabatan	Nama
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah	Hudaya Gobel
Wakil Ketua	Sarjono Rivai
Wakil Ketua	Ismail Pakudu, SE
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah	Mohammad Botutihe
Wakil Sekretaris	Sri Yuliani Dengo
Bendahara	Novita Ali
Wakil Bendahara	Maya Rahim

Sumber : DPW PSI Provinsi Gorontalo, 2018

c. Daftar Caleg PSI DPRD Provinsi Gorontalo

Tabel 2.7

Daftar Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo Partai

Solidaritas Indonesia Pemilu Legislatif 2019

No. Urut	Dapil Gorontalo 1 (Kota Gorontalo)	No. Urut	Dapil Gorontalo 5 (Gorontalo Utara)
1.	Hudaya Gobel	1.	Abdul Hafid Bora
2.	Maya Veronica Rahim, SM	2.	Nur Inda R. Umadji, S.Pd, M.Si
3.	Ismail Pakudu	3.	Safrin Humolunggo

Sumber : DPW PSI Provinsi Gorontalo, 2018